

POLITISASI AGAMA PILKADA DITINJAU DARI PERSPEKTIF AGAMA KRISTEN

Minerva Gabriela – minerva.gabriela.tuanakotta@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan tentang politisasi agama pilkada DKI dari pandangan Kristiani. Indonesia, negara yang majemuk, beragama, dan berTuhan harus menjalankan jati dirinya untuk berpolitik. Implikasi dari Indonesia sebagai negara yang beragam, beragama, dan berTuhan adalah menjamurnya partai politik dengan ideologi agama bersama berbagai upaya politisasi agama. Pengkajian harus dilakukan guna memutuskan lingkaran setan yang mengancam kesejahteraan dan pluralisme bangsa Indonesia, karena politisasi agama merupakan akar permasalahannya. Kasus politisasi agama yang terjadi di Indonesia salah satunya terdapat Pilkada DKI Jakarta. Kajian metode terhadap politisasi agama menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data *literature review*. Politisasi agama pada Pilkada DKI Jakarta ditemukan membawa politik semakin jauh dari kondisi ideal seperti tercapainya keharmonisan, keadilan, dan kesejahteraan. Hasil penelitian menunjukkan politik dan agama tidak dapat dipisahkan, sesungguhnya apabila hubungan politik dan agama berada pada posisi yang tepat maka dapat menciptakan kondisi yang ideal dan sempurna. Kesimpulan yang adapat disampaikan yakni, politik akan tetap menjadi dunia yang gelap meskipun sudah diisi oleh nilai-nilai kebaikan, sehingga peran penting orang percaya begitu nyata dalam dunia politik, karena hanya orang percaya yang sanggup memberikan cahaya untuk dapat mencapai kondisi ideal yang sempurna dalam berpolitik.

Kata Kunci: Politik, Pilkada, Agama Kristen

This research aims to reveal about the politicization of religion in DKI Jakarta election from a Christian perspective. Indonesia, a country that is diverse, religious, and has God, must carry out its identity in politics. The implication of Indonesia as a country that is diverse, religious, and godly is the proliferation of political parties with religious ideologies along with various efforts to politicize religion. A study must be conducted to break the vicious circle that threatens the welfare and pluralism of the Indonesian nation, because the politicization of religion is the root of the problem. One of the cases of politicization of religion in Indonesia is the DKI Jakarta Pilkada. The method study of the politicization of religion uses a qualitative approach by collecting literature review data. The politicization of religion in the DKI Jakarta Pilkada was found to have brought politics further away from ideal conditions such as achieving harmony, justice, and prosperity. The results of the study show that politics and religion cannot be separated, in fact if the relationship

between politics and religion is in the right position, it can create ideal and perfect conditions. The conclusion that can be conveyed is that politics will remain a dark world even though it has been filled with good values, so that the important role of believers is very real in the political world, because only believers are able to provide light to achieve perfect ideal conditions in politics. .

Keywords: Politics, Pilkada, Christianity

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara majemuk yang beragama dan ber-Tuhan. Kemajemukan Indonesia menjadi salah satu ciri khas yang tidak dapat ditemui pada negara lainnya. Bhineka Tunggal Ika menjadi semboyan negara yang menggambarkan bagaimana kemajemukan dalam Indonesia bersatu padu membentuk suatu negara yang damai meskipun ditengah-tengah berbagai perbedaan. Indonesia sebagai negara yang beragama dan ber-Tuhan dapat digambarkan melalui sila pertama dari Pancasila, yaitu Ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama pancasila menggambarkan sebagai suatu negara, Indonesia mengakui keberadaan Tuhan ditengah-tengah masyarakat dan negara, berbeda dengan negara lain, seperti negara komunis. Menempatkan unsur ke-Tuhanan pada sila yang pertama Pancasila menggambarkan bentuk penghormatan negara Indonesia kepada Tuhan. Implikasi dari Indonesia yang bhineka bersama dengan kepercayaannya pada Tuhan adalah timbulnya 6 agama yang diakui secara resmi oleh pemerintah Indonesia, yaitu: Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha, dan Konghucu.¹

Keberagaman dan kepercayaan Indonesia tidak melepaskan Indonesia dari identitasnya sebagai suatu negara, yaitu berpolitik. Kata-kata politik berasal dari bahasa Yunani yang artinya “kenegaraan”.² Indonesia tidak dapat mengingkari jati dirinya sebagai suatu negara untuk tidak berpolitik. Alasan lainnya mengapa politik tidak dapat diingkari dalam suatu negara dikarenakan politik menjadi implikasi dari manusia sebagai makhluk sosial yang bersosialisasi. Politik merupakan segala tindakan atau keputusan yang didasarkan pada tujuan utama yakni kesejahteraan masyarakat dan kota, sehingga orientasi dari setiap kegiatan politik haruslah kebaikan dan keadilan masyarakat atau warga negara.³ Pada perkembangannya dalam memahami aktivitas berpolitik terbagi menjadi dua yakni proses manusia hidup bersama dalam suatu negara dan perjuangan untuk memperoleh kekuasaan dalam pemerintahan negara.⁴ Politik juga dipandang sebagai disiplin

¹ <https://indonesia.go.id/profil/agama>. (Diunduh 31 Mei 2021, 15.30)

² Djoys Anake Rantung, *Pendidikan Agama Kristen dan Politik Dalam Kehidupan Masyarakat Majemuk Di Indonesia* (Shanan Jurnal Pendidikan Agama Kristen, Vol. 1, 2017), 58-73.

³ *Ibid.*, 59.

⁴ *Ibid.*, 60.

pengetahuan yang menggambarkan suatu kondisi ideal tatanan masyarakat dalam satu harmoni bersama.⁵

Perspektif Agama Kristen memandang pada dasarnya politik bukan merupakan bentuk perlawanan terhadap perintah Allah, melainkan salah satu aktivitas atau tindakan yang Allah kehendaki untuk dilakukan oleh orang percaya sebagai bentuk pertanggungjawaban keberadaannya dilingkungan masyarakat. Kondisi ideal yang dipahami dalam politik secara umum yakni mencapai kesejahteraan masyarakat bahkan sesuai dengan yang disampaikan oleh Tuhan melalui perantaraan Nabi Yeremia, dalam Yeremia 29:11, *Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu Aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu.*⁶ Tuhan mendorong umatNya untuk dapat turut serta mengambil tanggung jawab dan berpolitik, meskipun tidak terlibat secara langsung dalam pemerintahan. Lebih dari pada itu, dapat disimpulkan bahwa proses atau kegiatan politik dikatakan baik dan ideal apabila mampu menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat di negara tersebut.

Pada perkembangannya sebagai gabungan dari negara yang beragam, ber-Tuhan, dan berpolitik maka di Indonesia mulai menjamur partai-partai yang mendasarkan ideologinya pada agama tertentu.⁷ Setiap kegiatan yang dilakukan oleh partai politik yang berlandaskan pada agama tertentu akan disebut sebagai politisasi agama.⁸ Politisasi agama merupakan upaya untuk membuat gagasan, ide, pemahaman berkaitan tentang keagamaan menjadi bersifat politik dan kehilangan esensi keagamaannya.⁹ Fenomena menjamurnya partai politik yang berlandaskan kepada agama merupakan alat untuk memperoleh legitimasi masyarakat agar mampu memberikan kepercayaan kepada partai politik dan dapat berkuasa.¹⁰ Kesamaan identitas agama meningkatkan preferensi masyarakat untuk dapat memilih partai tersebut, peristiwa ini bahkan berlangsung di berbagai belahan dunia.¹¹ Meski pada awalnya hanya bertujuan untuk menarik kepercayaan dan suara dari para masyarakat dengan identitas agama sejenis, sayangnya politisasi agama semakin lama mengancam kebhinekaan Indonesia dan semakin bertentangan dengan semangat demokrasi.

⁵Munawar Ahmad, *Candy's Bowl: Politik Kerukunan Beragama Di Indonesia* (Harmoni, Vol. 12 No. 3, 2013), 37-51.

⁶Alkitab Indonesia, *Teks Alkitab Terjemahan Baru* (Jakarta: Lembaga Alkitab Indonesia, 2010).

⁷Siti, heryanto Murti, *Politik Identitas Agama - Studi Kasus Politisasi Agama Pada Pemilihan Bupati Morotai 2011* (Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Vol. 6 No. 3, 2020), 295-307.

⁸Andrew Heywood, *Politik edisi 4* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 55.

⁹Budi Kurniawan, *Politisasi Agama Di Tahun Politik: Politik Pasca-Kebenaran di Indonesia dan Ancaman Bagi Demokrasi* (Jurnal Sosiologi Agama, Vol. 12 No. 1, 2018), 133.

¹⁰Murti, *Politik Identitas Agama - Studi Kasus Politisasi Agama Pada Pemilihan Bupati Morotai 2011* (Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Vol. 6 No. 3, 2020), 295-307.

¹¹Michele Dillon, *Handbook of The Sociology of Religion* (United Kingdom: Cambridge University Press, 2003), 297.

Politisasi agama dapat membawa ancaman karena tujuan utama dari proses politisasi agama adalah tercapainya kepentingan orang-orang yang hendak berkuasa dengan cara apapun bahkan dengan menggunakan kekerasan atau metode lain yang tidak benar termasuk mengancam pluralisme dan semangat demokrasi.¹² Pihak yang berkuasa seringkali menimbulkan sentimen terhadap kepercayaan yang dianut oleh lawan politiknya untuk memperoleh kekuasaan. Ketika seorang politisi memperoleh kekuasaan dari kesamaan identitas agama maka dengan cara yang sama akan digunakan untuk melanggengkan kekuasaannya, sehingga pada pemilihan berikutnya tidak perlu takut untuk kehilangan suara. Upaya yang dapat dilakukan oleh politisi untuk melanggengkan kekuasaannya salah satunya dengan menggunakan perbedaan ajaran untuk mengancam keberadaan orang-orang yang beragama lain, sehingga dapat memperoleh kesan sebagai seorang agamis sejati yang membela agamanya. Perbedaan-perbedaan ajaran yang digunakan akan difokuskan kepada keyakinan teologis dan doktrin yang sudah tidak dapat disesuaikan dan dikompromikan, padahal semua agama pasti memiliki satu ajaran yang sama yaitu membawa perdamaian, kebaikan, dan kesejahteraan umat manusia. Tidak ada ajaran agama yang mengajarkan perpecahan, kebencian, dan kejahatan. Politisasi agama pada akhirnya tidak akan membawa politik pada tujuan ideal yang sudah disepakati oleh berbagai pihak yakni keharmonisan dan kesejahteraan masyarakat.

Politisasi agama pada beberapa kondisi seringkali menimbulkan konflik karena dimanfaatkan oleh pihak-pihak radikal yang hendak berkuasa. Paham radikalisme yang disebarkan demi memperoleh kekuasaan bahkan telah masuk ke dalam 10 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) favorit, seperti Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Institut Pertanian Bogor, dan PTN lainnya.¹³ Kasus-kasus diskriminasi di lingkungan kampus menjadi implikasi lain dari penyebaran radikalisme, selain dari pada diperolehnya legitimasi, kepercayaan, dan kekuasaan dari masyarakat. Peristiwa-peristiwa intoleran mulai muncul dari kalangan akademisi yang seharusnya bersifat netral. Institut Pertanian Bogor menjadi salah satu kampus yang secara nyata juga terlibat dalam kasus politisasi agama pada Pilkada DKI Jakarta 2017 dengan turut melaporkan Basuki Tjahja Purnama dan mendesak agar Basuki Tjahja Purnama segera ditahan.¹⁴

Peristiwa terpaparnya PTN dengan ajaran radikalisme dan terlibatnya Institut Pertanian Bogor dalam politisasi agama pada Pilkada DKI Jakarta 2017 menunjukkan bahwa implikasi yang ditimbulkan dari politisasi agama tidak hanya berada pada bidang politik tetapi juga bidang pendidikan. Pengaruh yang semakin meluas ke berbagai bidang membuat urgensi untuk mengkaji peristiwa politisasi

¹²Véronique Altglas, James A. Beckford, N. Jay Demerath, (Eds.), *The Sage Handbook of the Sociology of Religion* (Archives de Sciences Sociales Des Religions, Vol. 144, 2008), 163-274.

¹³<https://www.suara.com/news/2019/05/31/182859/survey-setara-ui-ugm-ipb-dan-7-ptn-lainnya-terpapar-paham-radikalisme?page=all>. (Diunduh 20 Juni, 14-40).

¹⁴<https://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2016/11/17/1054/alumni-ipb-laporkan-ahok-karena-fitnah-peserta-aksi-bela-islam-iii-sebagai-aksi-bayaran.html>. (Diunduh 14 Juni, 19.23).

agama semakin meningkat, terutama ketika sudah merambah kepada dunia pendidikan yang sangat signifikan mempengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengkajian terhadap politisasi agama harus dilakukan guna memutuskan lingkaran setan yang mengancam kesejahteraan dan pluralisme bangsa Indonesia, karena politisasi agama merupakan akar permasalahannya.

Metode Penelitian

Penelitian yang bertujuan menganalisis praktik politik di tengah masyarakat sosial dan beragama menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan proses untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data berbentuk narasi secara komprehensif guna melihat fenomena yang menarik dan menjadi fokus penelitian.¹⁵ Proses penelitian kualitatif yang dilaksanakan menggunakan teknik pengumpulan data studi literatur atau *literature review*. Studi literatur merupakan kegiatan mengumpulkan data yang berupa dokumen tertulis dalam catatan, surat kabar, buku, jurnal, artikel, majalan, notulen rapat, laporan, peraturan, dan sebagainya.¹⁶ Dokumen tersebut dapat bersifat pribadi maupun resmi.¹⁷ Penggunaan dokumen akan disesuaikan dengan kasus atau permasalahan yang sedang diteliti.

Secara lebih spesifik teknik studi literatur yang digunakan adalah studi literatur yang bersifat sistematis. Proses penelitian dari studi literatur sistematis diawali dengan proses penentuan kata-kata kunci pada mesin pencarian data.¹⁸ Berdasarkan hasil pencarian tersebut, literatur yang ditemukan kemudian diseleksi kembali untuk dipilih yang lebih sesuai dengan topik penelitian. Literatur yang sudah dikelompokkan disebut dengan *classified references*. Proses berikutnya adalah menganalisis data temuan dari hasil studi literatur dan menemukan kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah penelitian.¹⁹ Hasil temuan, analisis, dan kesimpulan disajikan secara deksriptif yaitu dengan menggambarkan atau meringkaskannya ke dalam kata-kata.²⁰

Objek penelitian yang akan diteliti saat ini adalah kasus politisasi agama pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 sehingga literatur-literatur yang digunakan adalah literatur yang relevan dengan objek penelitian tersebut. Politisasi agama pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2007 merupakan salah satu contoh praktik politik sosial di tengah masyarakat sosial beragama yang perlu untuk dikaji karena berbagai implikasi yang ditimbulkannya hingga sekarang bagi keberlangsungan hidup

¹⁵L R Gay, G E Mills, and P Airasian, *Education Research: Competencies for Analysis Application* (Upper Saddle River, United States of America: Pearson, 2019), 548.

¹⁶John W Creswell, *Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative* (Upper Saddle River: Prentice Hall, 2015), 79.

¹⁷A Bryman, *Social Research Methods* (England: OUP Oxford, 2012), 55.

¹⁸Bakhrudin All Habsy, *Seni Memahami Penelitian Kualitatif Dalam Bimbingan Dan Konseling: Studi Literatur* (Jurnal Konseling Andi Matappa, Vol. 1 No. 2, 2017), 90-100.

¹⁹Fiona Dziopa and Kathy Ahern, *A Systematic Literature Review of the Applications of Q-Technique and Its Methodology* (Boston: Hogrefe Publishing, 2011), 164-175.

²⁰*Ibid.*, 165.

masyarakat sosial beragama di Indonesia. Secara lebih khusus penelitian mengenai politisasi agama, akan menggunakan sudut pandang Alkitab sebagai pembanding praktik politik yang berlangsung dengan kondisi ideal yang seharusnya diharapkan.

Hasil Penelitian

Praktik politisasi agama di Indonesia diawali dengan munculnya berbagai partai politik yang melandasi ideologinya dengan agama tertentu, seperti: Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sosial (PKS), dan Gerindra. Mereka dalam berbagai kesempatan kampanye melabelisasi dirinya sebagai kelompok partai yang membela agama atau hizbullah bahkan mengatakan bahwa mereka adalah partai Allah yang berporos kepada Mekkah, guna memperoleh dukungan dan suara dari sesama kaum agamanya. Sedangkan partai politik lain mereka juluki sebagai partai setan.²¹ Julukan partai Mekkah dan partai setan disampaikan oleh Amien Rais. Perkataan Amien Rais bertentangan dengan apa yang sebelumnya pernah dikemukakan dalam bukunya yaitu “penggunaan simbol-simbol keagamaan dalam meningkatkan dukungan politik dapat memecah belah kaum muslimin.”²² Sesuai dengan pernyataannya tersebut terjadilah pertikaian dan perpecahan di tengah masyarakat.

Politisasi agama tidak hanya menciptakan ketidaknyamanan bagi agama minoritas karena merasa terancam dengan dominasi kekuasaan dari agama mayoritas. Pada perkembangannya politisasi agama ternyata juga menciptakan keresahan bagi para penganut Agama Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia. Seperti yang dikatakan oleh Amien Rais, terjadi perpecahan di antara penganut agama Islam yang menyetejui politisasi agama dan menolak politisasi agama. Kaum Muslim yang menolak politisasi agama mengatakan bahwa politisasi agama menimbulkan alih fungsi tempat ibadah Masjid menjadi tempat untuk melemparkan sentimen-sentimen politik agama seperti yang dilakukan oleh Rizieq Shihab pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2017.²³ Ketidaknyamanan lainnya muncul saat istilah umrah yang seharusnya dimaknai sebagai perjalanan rohani yang sakral ditambah dengan embel-embel politik pada saat Amien Rais, Prabowo, dan dua elit Partai Keadilan Sosial melakukan perjalanan ke tanah suci dan bertemu dengan Rizieq Shihab, sehingga dikatakan kegiatan tersebut adalah umrah politik.²⁴

Istilah-istilah agama yang digunakan dalam berpolitik mulai kehilangan esensinya sebagai istilah yang sakral dan istimewa, termasuk menggunakan berbagai kesempatan kegiatan keagamaan untuk berkampanye turut membuat kegiatan keagamaan kehilangan esensinya. Kaum Muslim yang menolak tindakan

²¹Kurniawan, *Loc. Cit.*

²²*Ibid.*

²³*Ibid.*

²⁴*Ibid.*

Rizieq Shihab melontarkan sentimen politik terhadap kepercayaan lain tentu sangat memahami bahwa agamanya tidak mengajarkan kebencian dan kejahatan, sementara Rizieq Shihab menyisipkan sentimen tersebut dalam ceramah yang disampaikan di suatu kegiatan keagamaan. Keagamaan menjadi bersifat politik dan tidak lagi bersifat rohani.²⁵ Kasus Basuki Tjahja Purnama dalam Pilkada 2017 membuktikan bahwa politisasi agama yang dilakukan oleh pasangan calon lawannya berhasil meningkatkan suara dan legitimasi dari pihak-pihak dengan kepercayaan yang sama dengan sang lawan dalam hal ini adalah para penganut agama muslim.

Bukti keberhasilan politisasi agama dapat dilihat melalui berbagai gerakan 212, 411, 313. Gerakan demonstrasi 211, 411, dan 313 yang sarat dengan unsur politisasi agama dilabeli dengan unsur kegamaan sehingga disebut sebagai “Aksi Bela Islam”.²⁶ Orang-orang yang tidak menyetujui “Aksi Bela Islam” bahkan dilabeli menjadi orang-orang yang “kurang islam” dan terdapat beberapa pihak yang mengatakan pendukung Basuki Tjahja Purnama tidak akan masuk surga.²⁷ Labelisasi “kurang islam” sungguh menyedihkan, karena menunjukkan bahwa tingkat keislaman seseorang hanya diukur dengan partisipasinya dalam aksi demonstrasi, dan menggeser posisi kegiatan amal ibadah yang sebelumnya menjadi indikator keislaman seseorang. Hak mutlak Tuhan yang Maha Esa untuk menentukan kelayakan seseorang masuk surga dipermainkan hanya untuk kepentingan politik.²⁸

Politisasi agama dalam bentuk anti pemimpin non-muslim diujarkan dalam berbagai kesempatan kampanye, oleh kedua pasangan calon yang menjadi lawan politik dari Basuki Tjahja Purnama.²⁹ Upaya politisasi agama berhasil merusak secara signifikan tingkat elektibilitas dari Basuki Tjahja Purnama, terbukti melalui survei yang menunjukkan bahwa 57% pemilih setuju Basuki Tjahja Purnama telah melakukan penistaan agama dan berkomitmen untuk memilih Anies Baswedan.³⁰ Politisasi agama berhasil membuat prestasi Basuki Tjahja Purnama sebagai gubernur dengan penilaian kinerja sebesar 87,2% tertutupi dengan kemampuan pasangan calon lawannya untuk membela agamanya. Para ahli menekankan bahwa tindakan para pasangan calon lawan dari Basuki Tjahja Purnama berbahaya untuk menyakiti demokrasi Indonesia yang sudah berprestasi selama 80 tahun.³¹ Keberhasilan politisasi agama pada Pilkada tahun 2017, memberikan

²⁵ Abdul. Ariyandi Batubara Malik, *Komodifikasi Agama Dalam Ruang Politik di Seberang Kota Jambi* (Kontekstualita, Vol. 29 No. 2, 2014), 99.

²⁶ Muhamad Ridwan Effendi, *Pertalian Agama Pada PILKADA DKI Jakarta Tahun 2017* (Mimbar Demokrasi, Vol. 19 No. 2, 2020), 12–27.

²⁷ *Ibid.*, 20

²⁸ <https://www.quareta.com/post/ahok-korban-politisasi-agama>. (Diunduh 14 Juni 2021, 16.22)

²⁹ Lita Larassati, *Kasus Pilkada DKI Jakarta Yang Mengalami Kemunduran Demokrasi Ditinjau Dari Legitimasi Dan Tujuan Negara Indonesia* (Madiun: Universitas Katholik Widya Mandala, 2017), 1-9.

³⁰ *Ibid.*, 7.

³¹ *Ibid.*, 9.

ide bagi para pasangan calon untuk kembali melakukannya pada Pilkada tahun 2018 dan Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun 2019.³² Proses pemilihan sudah tidak lagi berjalan dengan sehat untuk dapat menjaga kebhinekaan serta persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

Politisasi agama tidak hanya terbukti berhasil meningkatkan elektabilitas, tetapi juga berhasil meningkatkan konflik termasuk isu kriminalisasi ulama dan ancaman keberagaman dalam demokrasi Indonesia.³³ Politisasi agama meningkatkan kekerasan fisik dan psikis di lingkungan tempat tinggal sebagai bentuk konflik horizontal yang dimotivasi oleh karena perbedaan sikap dan pendapat dalam Pilkada DKI Jakarta. Wahid Foundation kemudian memberikan hasil riset yang menunjukkan jumlah pelanggaran Kemerdekaan Beragama Berkeyakinan (KBB) pada tahun 2017 adalah 213 peristiwa dengan 265 tindakan, dikatakan mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2016. Hasil riset mengatakan bahwa peningkatan pelanggaran tidak terlepas dari sumbangsih pesta politik yang berlangsung di tahun 2017, yaitu Pilkada 2017. DKI Jakarta bahkan menduduki peringkat pertama daerah dengan pelanggaran KBB terbanyak pada tahun 2017 yaitu 50 peristiwa. Kasus politisasi agama yang dialami oleh Basuki Tjahja Purnama pada Pilkada tahun 2017 memberikan sumbangsih yang besar bagi tingginya pelanggaran KBB di Ibukota.³⁴

Politisasi agama semakin berbahaya karena tidak hanya menciderai pluralisme, toleransi, dan kebhinekaan tetapi juga menciderai keadilan. Upaya memperoleh kekuasaan dilakukan dengan membuat Basuki Tjahja Purnama bersalah dalam kasus penistaan agama, sementara saksi ahli dipersidangkan mengatakan bahwa Basuki Tjahja Purnama tidak melakukan penistaan agama. Ishomuddin sebagai saksi ahli mengatakan bahwa proses perancangan dekrit tidak menggunakan prosedur yang adil, melanggar hak asasi manusia, bahkan melanggar identitas Agama Islam sebagai agama yang adil.³⁵ Kepolisian menghadapi jalan yang buntu karena desakan berbagai pihak bersamaan dengan meningkatnya urgensi untuk politisasi agama ini dihentikan. Bukti-bukti yang seharusnya menjadi aspek penting untuk menentukan hasil dalam pengadilan kehilangan kekuatannya.³⁶

Beberapa saksi mengatakan bahwa terdapat banyak pesan yang mengeluhkan pernyataan Basuki Tjahja Purnama, akan tetapi saat pengadilan meminta bentuk fisik dari bukti tersebut tidak ada yang berhasil memberikannya. Keputusan pengadilan pada akhirnya didasarkan kepada pendapat ahli yang diajukan oleh jaksa penuntut umum termasuk di dalamnya Rizieq Shihab, tentu

³²Kurniawan, *Loc. Cit.*

³³*Ibid.*

³⁴<https://kabar24.bisnis.com/read/20180808/79/825851/korban-politisasi-agama-dari-ahok-ridwan-kamil-hingga-anies-baswedan>. (Diunduh 10 Juni 2021, 18.54).

³⁵<https://www.matamatapolitik.com/sidang-penistaan-agama-ahok-dan-politisasi-agama-di-indonesia-analisis/>. (Diunduh 14 Juni 2021, 16.34).

³⁶*Ibid.*

keputusan ini tidak memiliki unsur keadilan di dalamnya. Sanksi yang seharusnya diterima oleh Basuki Tjahja Purnama adalah teguran keras dari Menteri Dalam Negeri dan bersifat administratif, akan tetapi sanksi yang pada kenyatannya diterima oleh Basuki Tjahja Purnama lebih berat daripada itu.³⁷

Politisasi agama yang berlangsung saat Pilkada 2017 ternyata memiliki dampak yang sangat besar dan memuncak pada Pemilihan Presiden di tahun 2019. Hasrat untuk berkuasa dan mendominasi, membუatkan para pelaku politisasi agama sehingga tidak hanya berusaha untuk menjatuhkan para politisi dan pasangan calon dari agama lain yang minoritas tetapi juga mengancam Presiden Joko Widodo sebagai kaum nasionalis, namun menganut agama mayoritas yang sama dengan para pelaku politisasi agama, yaitu Islam. Unsur-unsur agama kembali diutarakan dalam kampanye Pemilihan Presiden tahun 2019, pasangan calon lawan dari Presiden Joko Widodo menggunakan politisasi agama dimulai dari mengujarkan bahwa Presiden Joko Widodo kurang Islami bahkan sampai menyebut partai Presiden Joko Widodo sebagai partai setan.³⁸ Upaya untuk menjatuhkan Presiden Joko Widodo menjadi bentuk nyata dari implikasi perpecahan yang terjadi diantara Umat Islam pendukung politisasi agama dan penolak politisasi agama. Presiden Jokowi sebagai kaum nasionalis tentu menolak politisasi agama karena mengancam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

Pembahasan

Peristiwa politisasi agama yang terjadi pada Pilkada 2017 dan terus berlanjut hingga Pilkada 2018 sampai Pemilihan Presiden 2019 secara teoritis sangat jauh dari kondisi ideal yang diharapkan dalam berpolitik. Politisasi agama membuat harapan untuk menciptakan suatu masyarakat yang berbeda namun dapat bersatu padu dalam harmoni bersama tidak mungkin tercapai.³⁹ Harmoni di tengah perbedaan bersama hanya dapat tercapai apabila setiap iota perbedaan dihargai, dihormati, dan dipandang menjadi suatu keindahan. Harmoni tidak akan mungkin tercapai apabila setiap iota perbedaan dipermasalahan, dibenturkan, apalagi digunakan untuk mendominasi kekuasaan. Harmoni berasal dari istilah yang ada dalam permainan musik. Harmoni dalam permainan musik tidak akan tercapai apabila seorang pemain musik hanya berfokus pada nada-nada yang sumbang apabila dimainkan secara bersamaan. Harmoni akan tercapai ketika ditengah berbagai perbedaan suara dari setiap nada yang dibunyikan, seorang pemain musik berhasil menemukan keindahan saat beberapa nada dibunyikan secara bersamaan. Pelaku politisasi agama adalah pemain musik yang hanya berfokus untuk membunyikan nada-nada yang sumbang saat dibunyikan secara

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Kurniawan, *Loc. Cit.*

³⁹ Munawar Ahmad, *Candy's Bowl: Politik Kerukunan Beragama Di Indonesia* (Harmoni, Vol. 12 No. 3, 2013), 37-51.

bersamaan, dalam hal ini adalah berbagai perbedaan teologis dan ajaran. Kondisi yang ideal adalah bagaimana ditengah perbedaan mencari satu titik kondisi, untuk membuat nada-nada yang berbeda menjadi indah. Semua agama pasti mengajarkan kebaikan dan berasal dari hati nurani, saat pengajaran akan kebaikan dan hati nurani ditekankan tentu akan menciptakan suatu harmoni yang indah.

Keragaman dalam Alkitab dapat dilihat dalam 1 Korintus 12:12-31, melalui perumpamaan anggota tubuh Paulus menjelaskan bagaimana seorang percaya harus memandang keragaman dan perbedaan untuk dapat melaksanakan tugas yang Allah berikan.⁴⁰ Orang percaya tidak kebal terhadap politisasi agama, untuk itu orang percaya harus menggunakan sudut pandang yang disampaikan oleh Paulus dalam 1 Korintus 12:12-31 saat terlibat dalam berbagai kegiatan politik agar tidak terjerumus ke dalam politisasi agama. Perbedaan yang Tuhan kehendaki untuk terjadi sekalipun dalam hal agama dan kepercayaan tentu merupakan bagian dari rencana-Nya yang indah.

Keadilan menjadi kondisi ideal berikutnya yang secara teoritis diharapkan ada dalam politik.⁴¹ Pelanggaran terhadap unsur keadilan sangat nyata terlihat dalam peristiwa politisasi agama dalam Pilkada 2017 yang dialami oleh Basuki Tjahja Purnama. Idealnya pemilihan pasangan calon yang objektif tentu didasari oleh kinerja karena akan berpengaruh pada keberhasilan pemimpin untuk dapat melaksanakan tanggung jawab dan kepercayaan yang diberikan masyarakat, akan tetapi Pilkada 2017 sangat spesial sehingga kinerja pasangan calon dapat dikalahkan dengan kemampuan kampanye yang terkesan agamis. Kinerja Basuki Tjahja Purnama saat menjadi Gubernur DKI Jakarta yang bernilai 87,2% tidak ada artinya, karena elektabilitasnya tetap menurun dan sebesar 57% dari pemilih berkomitmen untuk memilih Anies Baswedan sebagai mantan Menteri Pendidikan yang pernah dipecat oleh Presiden Joko Widodo.⁴² Gelar “mantan” Menteri Pendidikan yang pernah dipecat oleh presiden seharusnya menjadi salah satu unsur penilaian kinerja yang buruk. Peristiwa hilangnya objektivitas dalam Pilkada 2017 menjadi salah satu wujud ketidakadilan yang terjadi pada Pilkada 2017.

Puncak dari ketidakadilan adalah ketika persidangan berlangsung. Persidangan Basuki Tjahja Purnama tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan sebelumnya. Basuki Tjahja Purnama yang seharusnya diberikan sanksi administratif berupa teguran dari Kementerian Dalam Negeri, namun karena alasan yang jauh dari unsur keadilan maka kasus Basuki Tjahja Purnama dilanjutkan kepada pengadilan. Kepolisian mendasari keputusannya karena

⁴⁰Alkitab Indonesia, *Teks Alkitab Terjemahan Baru* (Jakarta: Lembaga Alkitab Indonesia, 2010).

⁴¹Djoys Anake Rantung, *Pendidikan Agama Kristen Dan Politik Dalam Kehidupan Masyarakat Majemuk Di Indonesia* (Shanan Jurnal Pendidikan Agama Kristen, Vol. 1, 2017), 58-73.

⁴²Lita Larassati, *Kasus Pilkada DKI Jakarta Yang Mengalami Kemunduran Demokrasi Ditinjau Dari Legitimasi Dan Tujuan Negara Indonesia* (Madiun: Universitas Katholik Widya Mandala, 2017), 1-9.

desakan masyarakat dan upaya untuk menghentikan politisasi agama yang berlangsung, alasan ini tentu tidak memiliki dasar yang adil.⁴³ Keputusan persidangan seharusnya didasari kepada barang bukti, akan tetapi dikarenakan tidak ada barang bukti yang memadai maka keputusannya diambil berdasarkan saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum, tentu dasar pengambilan keputusan atas kasus Basuki Tjahja Purnama juga jauh dari keadilan.⁴⁴

Keadilan dalam Alkitab disebutkan sebanyak 190 kali, menggambarkan betapa pentingnya keadilan di mata Tuhan. Orang percaya harus tetap berpegang pada keadilan meskipun seringkali menjadi korban ketidakadilan. Ulangan 16:20 berkata *Semata-mata keadilan, itulah yang harus kaukejar, supaya engkau hidup dan memiliki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan, Allahmu.*⁴⁵ Tuhan mengatakan bahwa keadilan merupakan kunci untuk dapat memiliki dan memenangkan negeri yang Tuhan berikan, oleh karena itu orang percaya tidak boleh berpikiran untuk membalas ketidakadilan yang dialaminya pada saat politisasi agama berlangsung. Tidak sedikit orang percaya yang Tuhan percayakan untuk menjadi hakim, menduduki posisi penting sebagai pembuat kebijakann di pemerintahan, menjadi jaksa dan lain sebagainya. Tuhan mengkehendaki agar orang percaya tetap menjadi hakim yang adil, jaksa yang adil, birokrat yang adil, tanpa memandang ketidakadilan yang pernah dialaminya. Basuki Tjahja Purnama tetap menjadi komisaris Pertamina yang adil dan berkinerja meskipun telah mengalami ketidakadilan yang sungguh menyakitkan.⁴⁶

Kondisi ideal yang terakhir diharapkan untuk dapat menciptakan kesempurnaan dalam politik adalah kesejahteraan. Berbagai aksi demonstrasi yang terjadi dimulai dari 212, 411, dan 313 berujung kepada bentrok dan konflik. Konflik horizontal tidak hanya terjadi diantara para penganut Agama Islam dengan penganut agama lain tetapi juga terjadi dalam internal Agama Islam sendiri. Kekerasan psikis dilontarkan dengan menggunakan unsur-unsur kegamaan, seperti mengatakan Umat Islam yang menolak proses politisasi agama dalam Pilkada 2017 tidak akan masuk surga, mengatakan bahwa partai-partai di luar pelaku politisasi agama adalah partai setan, dan mengujarkan sentimen-sentimen keagamaan kepada Basuki Tjahja Purnama sebagai pasangan calon lawan yang menganut agama lain.⁴⁷ Konflik dalam bentuk kekerasan fisik juga terjadi di tengah-tengah aksi demonstrasi yang berlangsung ketika persidangan Basuki

⁴³Lita Larassati, *Kasus Pilkada DKI Jakarta Yang Mengalami Kemunduran Demokrasi Ditinjau Dari Legitimasi Dan Tujuan Negara Indonesia* (Madiun: Universitas Katholik Widya Mandala, 2017) 1-9.

⁴⁴<https://www.matamatapolitik.com/sidang-penistaan-agama-ahok-dan-politisasi-agama-di-indonesia-analisis/>. (Diunduh 14 Juni 2021, 16.34).

⁴⁵Alkitab Indonesia, *Teks Alkitab Terjemahan Baru* (Jakarta: Lembaga Alkitab Indonesia, 2010).

⁴⁶<https://rri.co.id/nasional/peristiwa/790863/menteri-bumn-kinerja-ahok-sebagai-komisaris-utama-pertamina-sesuai-harapan>. (Diunduh 16 Juni 2021, 17.31).

⁴⁷Muhamad Ridwan Effendi, *Pertalian Agama Pada PILKADA DKI Jakarta Tahun 2017* (Mimbar Demokrasi, Vol. 19 No. 2, 2020), 12–27.

Tjahja Purnama. Konflik fisik tidak hanya terjadi diantara para pendukung tetapi juga para demonstran dengan aparat negara. Semua pihak, yang berasal dari kalangan atau agama manapun tentu kehilangan kesejahteraannya pada saat itu. Perasaan terancam menghantui berbagai kalangan untuk dapat beraktivitas secara bebas pada saat peristiwa demonstrasi berlangsung.

Kesejahteraan menjadi kondisi ideal yang tidak hanya diharapkan secara teoritis oleh berbagai ahli tetapi juga oleh Tuhan sendiri melalui Yeremia 29:7.⁴⁸ Orang percaya harus tetap berusaha untuk menjaga kesejahteraan kota dan bangsanya apapun kondisi yang mendesaknya. Tuhan mengatakan bahwa kesejahteraan kota tempat tinggal orang percaya menjadi kesejahteraan penduduk kota tersebut, hal ini sangat sesuai dengan apa yang terjadi pada peristiwa demonstrasi dan politisasi agama pada Pilkada 2017. Penduduk Indonesia khususnya yang berada di Kota Jakarta dan sekitarnya sangat tidak sejahtera karena peristiwa tersebut, sehingga orang percaya memiliki pernanan yang sangat penting untuk tetap menjaga kesejahteraan kota dan penduduk didalamnya. Basuki Tjahja Purnama dalam berbagai kesempatan berusaha untuk meredam amarah pendukungnya agar membuat kondisi tetap kondusif dan sejahtera⁴⁹.

Peristiwa politisasi agama pada Pilkada 2017 sampai Pemilihan Presiden 2019 menggambarkan bagaimana kuatnya dominasi politisi yang hendak menguasai negara dengan menggunakan unsur-unsur keagamaan. Para ahli mengatakan bahwa memisahkan politik dan agama bukanlah solusi yang baik, karena pada hakikatnya keduanya memiliki hubungan resiprokal yang tidak dapat dihindari.⁵⁰ Kekuatan agama yang murni dan selalu mengajarkan kebaikan tanpa adanya intervensi pihak-pihak yang hendak memperoleh kekuasaan harus mendominasi proses politik. Tidak ada satupun agama yang mengajarkan kejahatan karena semuanya berlandaskan dari hati nurani, untuk itu agama yang selalu berorientasi kepada kesejahteraan dan kedamaian, tentu akan menghindari dominasi dan upaya untuk berkuasa apabila akan menimbulkan kejahatan dan kerusakan.

Peran penting orang percaya sebagai penjaga kesejahteraan, keadilan, dan harmoni bangsa dan negara tidak dapat tercapai hanya dengan berdiam diri tanpa terlibat dalam proses politik dan bahkan tidak terlibat dalam berbagai kegiatan bermasyarakat. Perubahan paradigma harus dialami oleh setiap orang percaya, tidak hanya berdoa tetapi juga bertindak. Sebagai penjaga kesejahteraan bangsa dan negara orang percaya harus terlibat secara aktif dalam proses politik untuk turut menanamkan nilai-nilai kebaikan dan mencegah terjadinya gangguan hanya demi mendominasi kekuasaan. Tekanan tidak boleh membuat orang percaya

⁴⁸Alkitab Indonesia, *Teks Alkitab Terjemahan Baru* (Jakarta: Lembaga Alkitab Indonesia, 2010).

⁴⁹<https://news.detik.com/berita/d-3352206/capek-dengar-pendukung-teriak-teriak-ahok-ingatkan-untuk-tenang>. (Diunduh 16 Juni 2021, 17.38).

⁵⁰Véronique Altglas, James A. Beckford, N. Jay Demerath, (Eds.), *The Sage Handbook of the Sociology of Religion* (Archives de Sciences Sociales Des Religions, Vol. 144, 2008), 163-274.

trauma hingga kehilangan kemampuan untuk memberikan cahaya bagi lingkungannya. Politik adalah dunia yang gelap sehingga membutuhkan orang percaya sebagai pembawa cahaya kepada kondisi ideal yang diharapkan untuk dicapai bersama yaitu kesejahteraan bangsa dan negara.

Kesimpulan

Politisasi agama bukanlah merupakan tindakan yang dapat membawa politik kepada kondisi ideal seperti harapan semua orang. Politisasi agama yang berlangsung pada Pilkada DKI Jakarta 2017 menjadi salah satu contoh pembelajaran bahwa bentuk kampanye yang membawa unsur agama dan menjatuhkan agama lain tidak menciptakan harmoni melainkan petaka. Kekuasaan yang diperoleh oleh Gubernur DKI Jakarta saat ini dengan menggunakan politisasi agama, membuat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan jatuh ke dalam berbagai tuntutan-tuntutan masyarakat untuk dapat memenuhi janjinya dan berujung kepada ketidakpuasan masyarakat. Politisasi agama dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 memiliki berbagai dampak negatif yang ditimbulkan dimulai dengan konflik horizontal diantara para penganut Agama Islam, kekerasan fisik, kekerasan psikis, sampai kepada meningkatnya pelanggaran terhadap KBB. Proses politik yang berlangsung dalam Pilkada DKI Jakarta jauh dari kebaikan, keadilan, harmoni, bahkan kesejahteraan yang didambakan untuk terjadi dalam berlangsungnya kegiatan berpolitik.

Politik dan agama tidak dapat dipisahkan, sesungguhnya apabila hubungan politik dan agama berada pada posisi yang tepat maka dapat menciptakan kondisi yang ideal dan sempurna. Agama yang murni dan selalu mengajarkan kebaikan memegang peranan sentral dalam berpolitik dan harus mendominasi proses politik tanpa adanya intervensi dari pihak-pihak yang ingin berkuasa. Agama dapat menciptakan politisi-politisi yang bermoral sesuai dengan ajaran agama. Orang percaya sebagai bagian dari umat beragama sesungguhnya memiliki peranan yang lebih sentral ditengah-tengah penganut agama lain. Orang percaya berperan sebagai penjaga keharmonisan, kebaikan, keadilan, dan kesejahteraan kota dan bangsa, sehingga harus terlibat aktif dalam proses berpolitik dan bermasyarakat. Politik akan tetap menjadi dunia yang gelap meskipun sudah diisi oleh nilai-nilai kebaikan, karena hanya orang percaya yang sanggup memberikan cahaya untuk dapat mencapai kondisi ideal yang sempurna dalam berpolitik.

Daftar Pustaka

- Alkitab. *Teks Alkitab Terjemahan Baru*. Jakarta: Lembaga Alkitab Indonesia, 2015.
- Ahmad, Munawar. *Candy's Bowl: Politik Kerukunan Beragama Di Indonesia*. Harmoni, Vol.12 No. 3, 2013.
- Bryman, A. *Social Research Methods*. England: OUP Oxford, 2012.
- Creswell, John W. *Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative*. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2002.

- Dillon, Michele. *Handbook of The Sociology of Religion*. United Kingdom: Cambridge University Press, 2003.
- Dziopa, Fiona, and Kathy Ahern. *A Systematic Literature Review of the Applications of Q-Technique and Its Methodology*. Boston: Hogrefe Publishing, 2011.
- Effendi, Muhamad Ridwan. *Pertalian Agama Pada Pilkada DKI Jakarta Tahun 2017*. *Mimbar Demokrasi*, Vol.19 No. 2, 2020.
- Gay, L R, G E Mills, and P Airasian. *Education Research: Competencies for Analysis Application*. Upper Saddle River, United States of America: Pearson, 2006.
- Habsy, Bakhrudin All. *Seni Memahami Penelitian Kuliitatif Dalam Bimbingan Dan Konseling: Studi Literatur*. *Jurnal Konseling Andi Matappa*, Vol.1 No. 2, 2017.
- Heywood, Andrew. *Politik*. 4th ed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Kurniawan, Budi. *Politisasi Agama Di Tahun Politik: Politik Pasca-Kebenaran Di Indonesia Dan Ancaman Bagi Demokrasi*. *Jurnal Sosiologi Agama*, Vol.12 No. 1, 2018.
- Larassati, Lita Kasus Pilkada DKI Jakarta Yang Mengalami Kemunduran Demokrasi Ditinjau Dari Legitimasi dan Tujuan Negara Indonesia. Madiun: Universitas Katholik Widya Mandala, 2017.
- Malik, Abdul. Ariyandi Batubara. *Komodifikasi Agama Dalam Ruang Politik Di Seberang Kota Jambi*. *Kontekstualita*, Vol. 29 No. 2, 2014.
- Murti, Siti. dan heryanto. *Politik Identitas Agama (Studi Kasus Politisasi Agama Pada Pemilihan Bupati Morotai 2011)*. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* Vol. 6, No. 3, 2020.
- Rantung, Djoys Anake. *Pendidikan Agama Kristen Dan Politik Dalam Kehidupan Masyarakat Majemuk Di Indonesia*. *Shanan Jurnal Pendidikan Agama Kristen*, Vol.1, 2017.
- Véronique Altglas, James A. Beckford, N. Jay Demerath, (Eds.), *The Sage Handbook of the Sociology of Religion*. *Archives de Sciences Sociales Des Religions*, Vol. 144, 2008.
- <https://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2016/11/17/105404/alumni-ipb-laporkan-ahok-karena-fitnah-peserta-aksi-bela-islam-ii-sebagai-aksi-bayaran.html>. Diunduh 14 Juni 2021, 19.23.
- <https://kabar24.bisnis.com/read/20180808/79/825851/korban-politisasi-agama-dari-ahok-ridwan-kamil-hingga-anies-baswedan>. Diunduh 10 Juni 2021, 18.54.
- <https://www.suara.com/news/2019/05/31/182859/survei-setara-ui-ugm-ipb-dan-7-ptn-lainnya-terpapar-paham-radikalisme?page=all>. Diunduh 10 Juni 2021, 14.40.
- <https://indonesia.go.id/profil/agama>. Diunduh 31 Mei 2021, 15.30.
- <https://www.matamatapolitik.com/sidang-penistaan-agama-ahok-dan-politisasi-agama-di-indonesia-analisis/>. 14 Juni 2021, 16.34.

<https://news.detik.com/berita/d-3352206/capek-dengar-pendukung-teriak-teriak-ahok-ingatkan-untuk-tenang>. Diunduh 16 Juni 2021, 17.38.

<https://www.quareta.com/post/ahok-korban-politisasi-agama>. Diunduh 14 Juni 2021, 16.22

<https://rri.co.id/nasional/peristiwa/790863/menteri-bumn-kinerja-ahok-sebagai-komisaris-utama-pertamina-sesuai-harapan>. Diunduh 16 Juni 2021, 17.31.